
PENANGANAN TERORISME: PERSPEKTIF PSIKOLOGI

Rena Latifa

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta

Email : rena.latifa@gmail.com

Abstract

This paper is a literature study on the roots of terrorism and alternative interventions that can be applied. The root of terrorism described in macro social standpoint, the system of government and politics, religion and ideology doctrination. Meanwhile, from the standpoint of the psychological explained about the special characters mediating the terrorist acts of aggressive behavior. The formation of social identity also participating whenever individual joined the terrorist organization. Intervention offered based on several literature findings. Jerrold (2005) focuses on preventing the entry of young people in a terrorist organization by the monitoring system of education, especially religious education. Rivera & Hancock (2003) mentions several psychological strategies in the fight against terrorism: the Anti-Terrorism, Counter-Terrorism, and Consequence Management. Woolf & Hulsizer (2005) offers a range of psychosocial model of primary prevention, secondary prevention and intervention.

Keywords: terrorism, terrorist, intervention

Terorisme adalah sebuah topik hangat yang sedang marak diperbincangkan. Banyak orang yang berpikir dan mengkaji tentang bagaimana cara menanggulangnya, sebab meskipun orang-orang yang terlibat di dalamnya sudah diberantas dan ditangkap namun masih saja muncul kembali dan memakan banyak korban. Penjelasan tentang terorisme biasanya bias oleh asumsi-asumsi politik dan prasangka sosial. Seringkali terjadi terorisme dalam bentuk kekerasan politik seperti kerusuhan, demonstrasi, revolusi, bahkan bentuk-bentuk konflik militer lingkup internasional (Newman, 2006). Dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari ragam pendekatan interdisipliner selain sudut pandang politik dan sosial, yakni perlunya memahami unsur sejarah, budaya, ekonomi, ideologi dan pemahaman terhadap ajaran suatu agama tertentu. Tulisan ini akan membahas terorisme berdasarkan sudut pandang makrososiologi, psikologi dan psikososial serta alternatif cara menanggulangi atau menghadapi serangan terorisme.

Berdasar sudut pandang makrososiologi, terorisme adalah suatu

refleksi dari ragam disfungsi sosial atau tanda dari sebuah konflik yang sedang terjadi pada sistem sosial. Beberapa penyebab yang memungkinkan adalah adanya kemiskinan, rezim otoriter dan represif, atau tema-tema latar budaya dan agama (Newman, 2006).

Para teroris diketahui adalah individu-individu yang masuk ke dalam suatu kelompok organisasi yang tujuan awalnya berusaha melakukan perubahan sosial (Kruglanski, 2003). Individu yang rentan untuk dapat masuk dan bergabung dalam organisasi teroris adalah individu yang merasa termarginalisasi (menjadi minoritas di masyarakat) atau dipinggirkan karena hidup dalam kondisi yang sulit, tidak stabil secara ekonomi, hak-haknya terpinggirkan, suaranya tidak didengarkan oleh pemerintah (Staub, 1989). Sebagai minoritas, mereka merasakan krisis yang dapat mengakibatkan rendahnya harga diri, rasa takut yang besar, frustrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan, identitas pribadi yang hilang, hingga meningkatkan prasangka kaum minoritas terhadap mayoritas. Semakin besar kekurangan atau derita yang mereka alami, semakin besar kebencian dan prasangka

yang berkembang. Hingga semakin mau untuk bergabung bersama organisasi teroris yang dapat mengembalikan harga dirinya, maka semakin tinggi rasa memiliki dan rasa aman.

Isu lain yang berkembang di dalam kelompok organisasi teroris ialah adanya keyakinan dan posisi politik atau isu-isu agama yang tidak diterima oleh kelompok mayoritas di masyarakat. Menurut Allport (1954), peran agama dalam kehidupan nyata sangatlah paradoks. Agama yang dijalankan oleh para penganutnya, selain mengajarkan kebaikan juga mengajarkan kekerasan. Ada orang yang selalu berbuat kebaikan pada semua orang, tetapi ada pula orang yang melakukan kekerasan dan perang atas nama agama. Pemeluk masing-masing agama pun memiliki potensi terciptanya dua sisi pandangan yang berbeda tentang agama, di satu sisi menciptakan kebaikan di sisi lain menciptakan kejahatan. Mengamati adanya peran agama yang paradoks, Allport menduga bahwa ada hubungan antara prasangka dengan faktor keberagaman pada masing-masing pemeluk. Analisis yang diteliti Allport telah membawanya pada tiga kesimpulan yang saling berhubungan. *Pertama*, persaudaraan dan kefanatikan kerap saling tercampur dalam agama. Banyak orang saleh penuh dengan rasa prasangka rasial tetapi banyak pula orang saleh yang menganjurkan keadilan rasial. *Kedua*, orang yang rajin ke tempat ibadah ada yang bersikap toleran dan intoleran terhadap agama lain. *Ketiga*, hubungan antara agama dan prasangka tergantung pada penghayatan agama yang dimiliki dalam hidup pribadi seseorang.

Individu-individu yang mengembangkan prasangka dan menjadi fanatik ini kemudian menjadi kelompok minoritas. Minoritas kemudian melakukan persuasi terhadap kelompok mayoritas agar sudut pandangnya dapat diterima. Dibutuhkan persuasi yang efektif dalam mengkomunikasikan gagasan atau keinginan minoritas ini. Menebarkan rasa takut dan teror melalui kekerasan dan pembunuhan massal merupakan bentuk komunikasi yang dianggap efektif oleh kaum minoritas ini (Kruglanski, 2003). Serangan teror ini

membuat masyarakat menjadi fokus memperhatikan tuntutan dan hal yang diinginkan oleh minoritas.

Berikut adalah bentuk-bentuk ideologi yang disebar di kalangan anggota organisasi teroris, sehingga mereka dapat dengan rela melakukan tindakan kekerasan pada orang lain (De la Corte, 2006): (1) Adanya keyakinan yang mendalam bahwa mereka sah-sah saja bertindak agresif sebab sudah terlalu banyak dan sering ketidakadilan sosial dirasakan oleh kelompok mereka sebagai minoritas, (2) Perlakuan tidak adil (ekonomi, sosial, politik, budaya) yang pernah diterima menyebabkan kebencian dan balas dendam dapat dilakukan dan dianjurkan, (3) Jika telah berhasil memberi rasa takut di tengah masyarakat, maka harga dirinya meningkat dan tidak dipandang remeh lagi oleh orang-orang yang telah memarginalisasikan keberadaannya, (4) Kekerasan merupakan satu-satunya cara yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan, sebab dialog sudah tidak berfungsi. Pendekatan persuasif juga bukanlah suatu hal yang dapat dipandang dan dipertimbangkan, (5) Ditumbuhkannya harapan yang tinggi bahwa tindak terorisme akan membuat hidup di masa depan menjadi lebih baik, tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang memarginalisasi, dihargai, dan dilibatkan dalam sistem politik dan kemasyarakatan yang lebih luas. Lebih jauh lagi, yang perlu diingat adalah bahwa dalam penyebaran ideologi ini dibutuhkan rencana yang strategis, dukungan logistik, penyandang dana, dan rekrutmen khusus. Untuk mendapatkan sumber-sumber ini, anggota organisasi teroris berani melakukan pencurian, penculikan, atau jenis bisnis legal dan ilegal lainnya.

Sementara itu penjelasan psikologisnya ialah terdapatnya ciri kepribadian 'perusak' dan 'sakit', emosional tak stabil, inferioritas (rendah diri yang kompleks) dan motif balas dendam. Individu-individu pelaku teroris diketahui kurang memiliki kemampuan mengendalikan impuls agresif, tidak memiliki empati pada orang-orang yang menjadi korbannya, mental dan cara pikirnya sudah sangat dipengaruhi unsur dogmatis

atau ideologi tertentu (fanatik), serta cara pandang yang utopis terhadap dunia di sekitarnya (De la Corte, 2006). Namun demikian, belum diketahui secara jelas apakah kepribadian atau karakter tersebut adalah karakter yang sudah menetap sejak kecil atau karakter tersebut dibentuk oleh pengalaman hidupnya hingga ia menjadi seorang teroris.

Individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh ide-ide radikal dapat menggiringnya untuk bergabung pada kelompok teroris yang biasanya memiliki ide dan nilai-nilai yang boleh dibilang mirip (Sageman, 2004). Berdasarkan penelitian Sageman (2004) pada pelaku teroris al-Qaeda, diketahui bahwa interaksi kaum muda muslim dengan kaum jihadis dapat membuatnya memiliki pemahaman jihad yang juga radikal. Hal lainnya ialah dilatari oleh pengalaman individu teroris dalam menempuh pendidikan khusus Islam dan atau keterlibatannya pada aktivitas masjid yang mengembangkan ajaran-ajaran radikalisme. Bentuk-bentuk indoktrinasi adalah berupa pembentukan mental yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi dan mempersiapkan mereka untuk terlibat pada 'aktivitas kriminal' yang dapat membahayakan orang lain, namun ada keberanian yang sangat besar di dalamnya. Penyebaran virus kebencian (*hatred*) yang mengakibatkan dendam berkepanjangan (*hostile*) pada rezim pemerintahan tertentu juga dilakukan terhadap para anggotanya (Staub, 1989). Apabila sudah terbentuk *hatred* dan *hostile* ini, maka para anggota organisasi teroris dapat berbuat apa saja termasuk tindak agresivitas. Agresivitas adalah hal yang dianggap normatif dalam memecahkan masalah menurut persepsi anggota organisasi teroris. Kultur agresi ini berkembang menjadi suatu bentuk penghancuran fasilitas publik, pembunuhan massal melalui bom dan sejenisnya (Staub, 1989).

Tipe individu yang dapat terdoktrinasi adalah individu yang cara pikirnya *heuristic* dalam mempersepsikan dunia (Ward & Jenkins, 1965). *Heuristic* adalah cara pikir seseorang tanpa analisa mendalam dan hanya 'berpikir di permukaan' saja. Sementara itu,

para penyebar doktrin adalah orang-orang cerdas yang sudah terbiasa memanipulasi pikiran *heuristic* manusia. Sekali terbentuk satu keyakinan tertentu, maka akan mudah bagi penyebar doktrin untuk memodifikasinya menjadi bentuk-bentuk pikiran yang disetujui oleh 'korban' yang akhirnya bersedia bergabung dengan kelompok organisasi teroris.

Individu yang telah bergabung pada suatu organisasi teroris biasanya berani bertindak agresif karena dalam dirinya telah terbentuk 'identitas kolektif'. Berikut penjelasannya berdasarkan teori identitas sosial (Taylor, 2003): (1) Terjadinya depersonalisasi, yakni teroris mempersepsikan diri mereka sebagai anggota yang saling mendukung dalam suatu organisasi. 'Diri pribadi' menjadi hilang identitas dan perannya secara personal. Hal ini memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Sayangnya, saat depersonalisasi terjadi, individu jadi 'kurang sadar-diri' (*less self-awareness*) dan menggiringnya untuk menjadi pribadi yang kurang bertanggung jawab atas tiap tindakannya, dan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan agresi (Festinger dkk., 1952), (2) Kohesi sosial, di mana identitas kolektif yang telah terbentuk tersebut membuat anggota organisasi dapat saling mengembangkan hubungan sosial yang positif sehingga meningkatkan rasa saling percaya, kelekatan dan kerjasama. Apabila kohesivitas kelompok sudah sangat solid, maka anggotanya akan senantiasa sepatutnya terhadap perkataan pimpinan hingga mudah diperintah oleh pimpinannya. Individu juga dapat mengabaikan logika dan sudut pandang pribadinya (Janis, 1982), (3) Konformitas dan kepatuhan. Semakin besar identifikasi dirinya terhadap organisasi, semakin besar pula identifikasi individu terhadap norma-norma yang dianut oleh organisasi. Untuk kemudian, mereka akan berani untuk melakukan hal apa saja yang dianggap benar oleh pimpinannya. Peran pemimpin di sini sangat menentukan. Tanpa pemimpin yang *powerful*, kharismatik, rasa percaya diri tinggi dan cerdas, anggota organisasi tidak akan berani mengambil tindakan. Terhadap pimpinannya, mereka

akan bersikap rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, dan merasa *heroik* jika berhasil mengorbankan dirinya (Post, 2005). Seorang pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan memanipulasi cara pikir anggota organisasinya, punya pengaruh dan dapat berelasi dengan ragam orang (Woolf & Hulsizer, 2005), (4) Sudut pandang bipolar. Jika individu yang sudah tergabung pada organisasi ekstrimis tersebut sudah terlalu menjiwai keberadaan organisasinya, maka dapat menggiringnya untuk senantiasa berprasangka negatif pada orang-orang yang berada di luar organisasinya. Dunianya terbagi menjadi 'kami' dan 'mereka'. Tajfel dan Turner (1986) menyebutnya sebagai identitas '*in-groups*' dan '*out-groups*'. '*In-group*' atau identitas sebagai 'kami', membuat harga diri anggota organisasi menjadi terangkat karena menjadi bagian dari anggota kelompok yang 'disegani' atau 'ditakuti' masyarakat. Menyandang 'identitas sosial' yang bergengsi ini dapat menumbuhkan harga diri anggota organisasi. Sementara itu, identitas '*out-group*' membuat anggota organisasi mengembangkan prasangka, diskriminasi dan kekerasan pada komunitas yang berada di luarnya atau yang disebut sebagai 'mereka'.

Jika tujuan dari gerakan terorisme adalah membentuk teror di masyarakat, maka harus dibuat program yang dapat memperlemah gerakan terorisme dan mempromosikan 'masyarakat sadar dan kebal teror'. Tiap fase dari daur hidup teroris adalah fokus yang potensial dalam penanganan terorisme ini. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan (Jerrold, 2005): (1) Memutus akar teroris harus sejak dini, di mana rekrutmen anggota organisasi mulai terjadi. Waspada tumbuh kembang kaum muda untuk tidak terlibat pada organisasi ekstrim, sebab sejak usia muda penanaman kebencian dan dendam dapat dengan mudah mengakar hingga akhirnya membentuk pribadi teroris. Pemerintah sebaiknya memantau bentuk-bentuk pendidikan agama yang ada, memantau kurikulumnya dan melakukan pengawasan secara ketat terhadap ajaran yang disampaikan, (2) Menghambat kemungkinan masuknya satu

individu pada organisasi teroris. Tutup informasi tentang keberadaan organisasi teroris, libatkan masyarakat setempat untuk memiliki kesadaran melapor pada polisi terhadap aktivitas-aktivitas kelompok minoritas yang dianggap mencurigakan, (3) Fasilitasi kemungkinan keluarnya satu anggota organisasi teroris dari organisasinya. Misal, pada pelaku teror yang berhasil ditangkap polisi, dapat diberikan amnesti dari hukuman dengan syarat keluar dari organisasi tersebut. Persepsinya terhadap pemerintah dapat berubah menjadi positif, saat diberlakukan amnesti. Namun demikian, harus tetap dipantau kehidupannya pasca amnesti, (4) Kurangi dukungan terhadap para pemimpin organisasi radikal teror dan terhadap organisasinya. Tujuannya adalah untuk mengalienasi atau mengucilkan organisasi sehingga tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah hingga memutus penyaluran dana organisasi. Akibatnya, anggota organisasinya menjadi sengsara dan ada kemungkinan untuk meninggalkan organisasinya.

Sementara itu, berdasarkan penelitian Rivera dan Hancock (2003) disebutkan beberapa strategi psikologis dalam memerangi terorisme. Pertama: *Anti-Terrorism*. Pihak-pihak yang berkewajiban melindungi masyarakat dari gerakan teror hendaknya dapat lebih mempelajari gerakan-gerakan terorisme dan kelemahan-kelemahannya. Apa saja infrastruktur yang digunakan, bentuk-bentuk modus tindakan, serta target operasional kaum teror, sehingga destruktivitas massal dapat diantisipasi, dikurangi bahkan dihambat kejadiannya. Di sisi lain, harus ditingkatkan infrastruktur yang menjamin rasa aman masyarakat. Perlu pula diberikan *reward* pada anggota masyarakat yang melaporkan kelompok yang diduga teror, dan anggota masyarakat yang melaporkan adanya infrastruktur yang membahayakan dan mengancam keselamatan orang banyak (seperti bangunan gedung yang tampak 'rapuh', atau tidak adanya CCTV (*Closed-circuit Television*) pada suatu gedung yang dianggap berpotensi menjadi sasaran teror, tidak adanya sistem keamanan yang ketat menggunakan *baggage screening* di

bandara-bandara atau hotel).

Kedua: *Counter-Terrorism*. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan bahaya terorisme serta kemampuan deteksi dini terhadap kelompok-kelompok yang diduga dapat menjadi pelaku teror. Tiap aktivitas terorisme dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, eksekusi dan melarikan diri secara terorganisir dan matang. Karenanya, penting mengedukasi masyarakat untuk 'sadar' dan 'waspada' pada tiap detail ragam aktivitas organisasi teroris. Misal, masyarakat dapat melaporkan pola aktivitas tertentu yang dianggap tidak biasa (contoh: pembelian barang-barang tertentu –bubuk kimia bahan dasar bom- dalam jumlah banyak) atau masyarakat dapat melaporkan adanya objek yang mencurigakan seperti bungkusan paket atau barang yang tergeletak tanpa tuan di suatu tempat. Kegiatan menghalau terorisme ini perlu didukung oleh pemerintah dalam bentuk identifikasi kemampuan dan kelemahan apa saja yang sudah ada pada masyarakat dalam menyadari keberadaan teroris. Selain itu juga harus diidentifikasi kondisi seperti apa saja yang dapat membuat kesadaran masyarakat akan terorisme menjadi melemah atau menjadi tidak peduli pada terorisme. Pemerintah juga sebaiknya memfasilitasi peningkatan kemampuan deteksi dini terorisme pada masyarakat: tingkatkan kemampuan atensi, fokus dalam mendeteksi suatu sinyal teroris, serta kemampuan mengambil keputusan cepat untuk melaporkan suatu kejadian mencurigakan pada pihak polisi.

Ketiga: *Consequence Management*: Menjadi korban teroris konsekuensinya adalah antara hidup dan mati, maka dari itu dibutuhkan peningkatan kemampuan dalam mengelola konsekuensi tersebut. Masyarakat sebaiknya dilatih kemampuan dalam hal melarikan diri dan proses evakuasi korban teroris, ditingkatkan resiliensinya (daya tahan terhadap stress akibat paparan berita terorisme) dan diajarkan bagaimana caranya memperlakukan korban terorisme secara efektif. Dapat diberlakukan *stress exposure training* dalam mengelola rasa takut akan tindakan terorisme, serta dapat diberikan

post-traumatic dan *treatment* psikologis dalam menghadapi situasi krisis.

Woolf dan Hulsizer (2005) menawarkan model psikososial yang berkisar pada prevensi primer, prevensi sekunder dan intervensi. Model yang pertama adalah prevensi primer. Dalam rangka menjembatani adanya jurang prasangka yang dalam antara pelaku teror dan masyarakat yang menjadi korban, penting dikembangkan hubungan yang positif antar dua kelompok yang bersebrangan ini. Bagi pelaku disosialisasikan kerugian dan derita yang dialami para korban teror, sementara itu bagi masyarakat disosialisasikan etiologi atau akar terjadinya teroris. Pemerintah juga dapat mendukung keadilan sosial yang merata bagi masyarakatnya, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang merasa minoritas dan termarginalisasikan. Pemerintah menjamin hak politik dan partisipasi politik supaya tidak ada pihak yang merasa hak-haknya dikebiri. Begitu pula dalam partisipasi politik misalnya, keterbukaan atas hak-hak suara rakyat, baik mayoritas maupun minoritas dapat dihargai. Dalam kehidupan berpolitik, sikap toleran adalah sumber interaksi yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang plural dan demokratis. Hal yang dibutuhkan dalam toleransi politik terwujud dalam sikap masyarakat yang demokratis dan adanya rasa aman. Seluruh suara dan hak-hak warga negara ditampung oleh negara tanpa ada diskriminasi status. Sebaliknya, bentuk diskriminasi status menandakan masih adanya sikap politik yang intoleran. Robert Dahl (1971) mensyaratkan delapan jaminan institusional yang diperlukan untuk demokrasi. Delapan jaminan institusional itu adalah (1) kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, (2) kebebasan berekspresi, (3) hak memberikan suara, (4) eligibilitas untuk menduduki jabatan publik, (5) hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara, (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, (7) pemilu yang bebas dan adil, dan (8) institusi-institusi yang tersedia untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara

(pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.

Penting pula menanamkan sistem edukasi berbasis *'peace education'* (Staub, 1989), di mana diajarkan ketrampilan pemecahan masalah tanpa kekerasan (*non-violent conflict resolution skill*). Pada siswa sekolah dan mahasiswa harus diajarkan ragam jenis resolusi konflik atau cara pemecahan masalah yang beragam, serta ketrampilan berpikir kritis dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya kepatuhan yang membabi buta (*blind obedience*). Pada remaja dan anak-anak juga harus ditanamkan nilai-nilai toleransi, mengapresiasi kemajemukan dan meminimalisasi prasangka atau kebencian pada golongan tertentu di masyarakat. Kehidupan bertoleransi adalah suatu kondisi masyarakat yang menghargai adanya perbedaan. Hadirnya sikap toleran berarti menyadari bahwa manusia tidak hidup sendiri (Moscovici & Doise, 1994) melainkan berdampingan bersama orang lain. Sikap toleran dapat menciptakan kehidupan yang damai dan tentram, sedangkan sikap intoleran hanya akan menciptakan kehidupan yang penuh kebencian dan konflik.

Model yang kedua adalah prevensi sekunder. Saat di masyarakat sedang terjadi krisis (ekonomi, politik atau krisis lingkungan hidup), tiap-tiap anggota masyarakat harus dapat bersikap responsif atas kebutuhan anggota masyarakat lainnya, dalam arti saling membantu satu sama lain. Media dan sistem informasi dapat digunakan masyarakat untuk menghalau informasi terkait propaganda yang sedang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Model yang ketiga adalah intervensi. Fokus intervensi adalah seputar penurunan jumlah masyarakat yang menjadi korban terorisme, sebab trauma yang dialami para korban dapat menjadi kontribusi bagi berkembangnya tindak kekerasan di masa depan dan bukan tidak mungkin jika mereka yang menjadi korban di saat ini dapat menjadi pelaku teror di masa depan. Para korban dapat difasilitasi dengan menyediakan forum untuk mencurahkan perasaan dan rasa sakitnya akibat menjadi

korban teroris.

Selain itu fokus juga ditujukan untuk meminimalisasi jumlah pelaku teror. Tekanan politik yang ekstrem dapat dilakukan terhadap para pelaku teror. Dapat diberlakukan boikot dan sanksi yang berat terhadap pelaku, bahkan jika dibutuhkan dapat digunakan intervensi dari pihak militer demi mencegah kerusakan yang lebih jauh.

Upaya untuk mengurangi jumlah tindakan teroris membutuhkan diplomasi dan komunikasi yang simultan dan terorganisasi. Untuk mengubah budaya kebencian dan kekerasan para anggota teroris ini mungkin akan memakan waktu dalam hitungan dekade. Selain itu, penting pula untuk memelihara pedoman moral dalam penegakan hukum, *good governance* dan keadilan sosial. Perjuangan melawan teroris bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak militer saja, melainkan perlu keterlibatan seluruh masyarakat dan kerjasama antar disiplin ilmu. Intervensi berbasis komunitas perlu digalakkan dan dipelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Boston: The Beacon Press.
- Dahl, R. (1971). *Polirchy*. New Haven: Yale University Press.
- De la Corte, L. (2007). *Explaining Terrorism: A Psychosocial Approach*. Perspectives on Terrorism. *Journal of The Terrorism Research Initiative*. 1 (2), 78-90.
- Festinger, L. (1952). *Some Consequences of Deindividuation in a Group*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 47, 382-389.
- Janis, I.L. (1982). *Groupthink*. Boston: Houghton Mifflin.
- Koltko-Rivera, M.E. & Hancock, P.A. (2003). *Psychological Strategies for the Defence Against Terrorism*.

- Paper presented at the RTO SCI Symposium on "Systems, Concepts and Integration (SCI) Methods and Technologies for Defence Against Terrorism," held in London, United Kingdom, 25-27 October 2004, and published in RTO-MP-SCI-158.*
- Kruglanski, A. W. & Webster, D. M. (1991). Group member's reactions to opinion deviates and conformists at varying degrees of proximity to decision deadline dan of environmental noise. *Journal of Personality dan Social Psychology*, 61 (2), 212-225.
- Moscovici, S., & Doise, W. (1994). *Social Influence and Conformity*. London: Sage publicataion
- Newman, E. (2006). Exploring the 'root causes' of terrorism. *Studies in Conflict and Terrorism*, 29, 49-772.
- Post, J. (2005). *The Psychological and Behavioral Bases of Terrorism: Individual, Group and Collective Contributions*.
- Sageman, M. (2004). *Understanding Terrorist Networks*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
- Staub, E. (1989). *The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence*. New York: Cambridge University Press.
- Tajfel, H. & Turner, J. (1986). *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. Chicago: Nelson-Hall.
- Taylor, D. M. & Louis, W. (2003). *Terrorism and The Quest for Identity*. Washington: American Psychological Association.
- Ward & Jenkins. (1965). *The Display of Information and The Judgement of Contingency*. *Canadian Journal of Psychology*, 19, 231-241.
- Woolf, L.M & Hulsizer, M.R. (2005). *Psychosocial Roots of Genocide: Risk, Prevention, and Intervention*. *Journal of Genocide Research*, 7, 101-128.